



Analisis Kebijakan Kevin Rudd terkait Pencari Suaka di Australia dalam *PNG Solutions*

Nurlaily Helmiyana*

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 15412, Indonesia

Submitted: 27 April 2020 Revision : 2 June 2020 Accepted : 13 July 2020

Abstrak

Papua New Guinea Solutions (PNG Solutions) adalah kebijakan hubungan bilateral antara Australia di bawah pemerintahan Perdana Menteri Kevin Rudd dengan Papua Nugini mengenai *anti-resettlement* yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin memasuki Australia dan mendapatkan status sebagai pengungsi dengan menggunakan perahu. Solusi ini diambil setelah Kevin Rudd yang berasal dari Partai Buruh Australia menghentikan *Pacific Solutions* yang telah digunakan selama pemerintahan Perdana Menteri Howard. Adanya perbedaan dalam upaya dalam mengatasi kedatangan pencari suaka dapat dilihat dengan menggunakan Model Birokratik dalam analisisnya. Upaya ini dilakukan dengan tujuan sekuritisasi Australia akibat tingginya angka pencari suaka ke Australia. Hal yang menjadi masalah adalah, Australia telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Inti dari *PNG Solutions* adalah apabila ada individu maupun kelompok yang datang ke Australia yang biasanya melalui perairan, serta tanpa visa dan identitas yang jelas tidak diizinkan masuk ke Australia dan akan ditempatkan di Papua Nugini. Kepentingan nasional Australia bisa melukai konvensi yang telah diratifikasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder, serta analisis menggunakan konsep sekuritisasi dan menggunakan penelitian Barry Buzan dalam bukunya *People, State, and Fear*. Sehingga dapat dikatakan bahwa partai politik dengan ideologinya mempengaruhi kabinet, serta menentukan bagaimana arah kebijakan luar negeri Australia terkait masalah pencari suaka.

Kata Kunci: *PNG Solutions*, Pencari Suaka, *Anti-resettlement Policy*, Kebijakan Luar Negeri Australia

Abstract

*Papua New Guinea Solution is a policy of bilateral relations between Australia under the government of Prime Minister Kevin Rudd and Papua New Guinea regarding anti-resettlement conducted by people who want to access Australia and gain status as refugees by boat. This solution was taken after Kevin Rudd who came from the Australian Labor Party sent Pacific Solutions which had been used during Prime Minister Howard's administration. The difference in efforts to overcome the arrival of aid can be seen by using the Bureaucratic Model in its analysis. This effort was carried out to secure Australia. The problem is, Australia has ratified the 1951 Refugee conference. The essence of PNG Solutions is individuals or groups who come to Australia who need it through negotiations, and without a visa and a clear identity are not allowed into Australia and will be transferred in Papua New Guinea. Australia's national interests can hurt ratified conventions. This study uses qualitative methods using secondary data, and analysis uses the concept of securitization and uses Barry Buzan's research in his book *People, State, and Fear*. This policy can help determine political policies related to the cabinet, and determine the direction of Australia's foreign policy.*

Password: *PNG Solutions, Assylum Seekers, Anti-Resettlement Policy, Australia's Foreign Policy*

How to Cite: Helmiyana, Nurlaily. (2020). Analisis Kebijakan Kevin Rudd terkait Pencari Suaka dalam *PNG Solutions*, *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 12 (2): 114-125.

*Corresponding author:

E-mail: nurlaily.helmiyana17@mhs.uinjkt.ac.id

PENDAHULUAN

Australia merupakan negara tujuan terbesar bagi pencari suaka maupun pengungsi di wilayah Asia Pasifik. Kebanyakan para pencari suaka berasal dari wilayah Asia Tenggara, negara-negara di Timur Tengah yang sedang mengalami konflik dan negara-negara di kecil di Pasifik. Namun, tidak selamanya Australia dengan serta memberikan kemudahan untuk masuk dan mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam beberapa dekade, Australia mengalami perubahan kebijakan dalam mengurus pencari suaka. Hal ini dapat dikaitkan dengan pandangan politik maupun latar belakang pemerintahnya. Australia meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Namun, ada beberapa kebijakan yang tidak sejalan dengan hukum internasional yang telah diatifikasi sebelumnya.

Papua New Guinea Solution (PNG Solutions) adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kevin Rudd selaku Perdana Menteri Australia di periode kedua ia berkuasa. PNG (*Papua New Guinea*) *Solutions* merupakan kebijakan berbentuk kerja sama

antara Australia dan Papua Nugini terkait pencari suaka yang tidak memiliki paspor atau visa, serta menyebrang ke Australia menggunakan kapal tidak dapat tinggal di Australia dan akan dikirimkan ke Papua Nugini (Tamba, 2018).

Dalam sejarahnya, Australia beberapa kali mengalami gelombang pencari suaka yang menggunakan perahu atau yang sering disebut dengan "*boat people*" atau orang kapal. Gelombang pertama berasal dari Vietnam di akhir 1970-an. Perdana Menteri Australia pada saat itu adalah Malcolm Fraser, di bawah kekuasaannya ia memberikan bantuan dan respon internasional terhadap orang-orang yang melarikan diri Vietnam untuk ditahan di kamp-kamp di wilayah Thailand, Malaysia dan Indonesia. Ini merupakan awal para pengungsi diletakkan di negara-negara dunia ketiga.

Di akhir 1980-an menyusul gelombang kedua yang kebanyakan berasal dari Kamboja. Perdana Menteri Hawke berupaya untuk mengontrol kedatangan yang membludak. Oleh karena itu di 1992,

Perdana Menteri Keating memperkenalkan kebijakan baru yaitu adanya penahanan wajib dalam menentukan apakah individu tersebut berhak mendapatkan suaka. Pada 2001, Perdana Menteri Howard mengeluarkan *Pacific Solutions*. Kebijakan itu dibuat setelah menolak kedatangan Kapal Norwegia, *The Tampa*, yang membawa 450 orang kapal yang diselamatkan dari perairan internasional (Millbank, 2009).

Dari beberapa kebijakan pemerintah Australia tersebut dapat dilihat bahwa meskipun Australia meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 mengenai perlindungan pengungsi yang mencari suaka, jaminan hak-hak, serta tidak boleh mendapatkan diskriminasi apapun. Maka, Australia tidak menjalankan hukum internasional dengan seharusnya. Penempatan para pencari suaka yang datang ke Australia menggunakan perahu atau dengan term ilegal akan ditempatkan di Papua Nugini sebagaimana kebijakan bilateral ini disetujui. Namun, ada hal menarik yang dapat dilihat dari sisi sosiologi, yakni pola pikir masyarakat Papua

Nugini. Papua Nugini merupakan sebuah negara berkembang yang sistem perekonomiannya tidak sestabil Australia.

Orang-orang yang mencari suaka adalah orang-orang menginginkan kehidupan yang lebih baik di mana UNHCR (*United Nations High Commisioner for Refugees*) atau disebut juga Komisioner Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi memberikan syarat-syarat orang yang dapat digolongkan sebagai pencari suaka. Seorang antropolog bernama Joel Robbins menemukan bahwa struktur pemikiran orang Urapmin di Sepik Barat yang dipengaruhi oleh ajaran nasrani mengindikasikan diri mereka sebagai pendosa dan inferior dibandingkan warga negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat. Dengan demikian muncullah *term* nasionalisme negatif, yang dari segi ekonomi dapat dilihat adanya protes anti korupsi yang hanya bisa diberantas oleh orang kulit putih saja. Oleh karena itu *PNG (Papua New Guinea) Solutions* dianggap melukai hukum internasional dan “membuang” pencari suaka ke pulau-

pulau kecil di Papua Nugini (Walton, 2013).

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana dinamika kebijakan luar negeri Australia terkait masalah pencari suaka yang dianggap mengancam kepentingan nasional. Sehingga, pertanyaan yang muncul adalah Bagaimana partai politik di Australia mempengaruhi dinamika kebijakan luar negeri Australia? Mengingat, perubahan kebijakan luar negeri ditentukan oleh partai politik yang berkuasa di kabinet, serta sebagai partai penyokong perdana menteri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang menghasilkan tulisan yang bersifat deskriptif. Pengolahan data dilakukan dengan menganalisa keterlibatan partai politik dalam parlemen Australia yang bipartisan. Serta upaya membuktikan asumsi bahwa dalam pengeluaran kebijakan mengalami proses tawar-menawar antar pemegang kekuasaan di partai politik. Data-data diperoleh melalui

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang membedakan adalah penggunaan pendekatan birokratik politik dalam menganalisa politik luar negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya pergeseran mengenai konsep keamanan setelah perang dingin mengakibatkan berubahnya pandangan negara-negara terhadap konsep keamanan kedaulatannya. Pergeseran dari *high politics* seperti militer menjadi *low politics* yang lebih menekankan pada keamanan manusia juga kerap menjadi fokus utama negara. Meskipun *high politics* masih dijadikan sebagai patokan kekuatan suatu negara, tetapi keamanan yang sebelumnya tidak terlalu digubris menjadi fokus utama. Misalnya, kerawanan pangan atau pangan yang dijadikan sebagai senjata agar kelangkaannya menyebabkan kematian sehingga mempengaruhi stabilitas suatu negara.

Menurut *Copenhagen school* konsep sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor yang memiliki wewenang akan mengalami beberapa proses:

proses pertama, pengambil kebijakan akan mengidentifikasi apakah suatu isu merupakan sebuah ancaman dimana isu tersebut bisa isu politik maupun non-politik namun dipolitisasi. Kedua, proses yang menggunakan tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik, sehingga publik semakin yakin bahwa apa yang diambil oleh pengambil kebijakan merupakan ancaman bersama. Kemudian, proses pemetaan kompleksitas ancaman tersebut.

Barry Buzan dalam bukunya *People, State, and Fear* membagi keamanan berdasarkan level dan sektornya, hal ini dijelaskan lebih dalam di artikelnya yang berjudul “*New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century*”. Buzan membaginya menjadi sektor politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan (Stone, 2009). Dalam melihat permasalahan pencari suaka, maka Perdana Menteri Kevin Rudd akan melihat ancaman berupa ancaman ekonomi dan ancaman sosial. Pencari suaka yang berdatangan akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh

karena itu pemerintah harus menggulingkan dana yang cukup besar melalui penarikan pajak, serta dalam ancaman sosial, Perdana Menteri Rudd harus memikirkan apabila pencari suaka ini tidak mampu berintegrasi serta meningkatkan tingkat kriminalitas di Australia.

Dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus adalah mengenai keamanan manusia (*human security*) atau menjurus kepada pencari suaka di era pemerintahan Kevin Rudd. Konsep sekuritas sendiri menurut McDonald adalah sekuritisasi merupakan proses dimana aktor mendeklarasikan bahwa sebuah isu tertentu menjadi suatu ancaman terhadap *referent object* (Rizal, 2019). Meskipun ada pergeseran fokus, keamanan manusia tetap akan memiliki keterkaitan keamanan tradisional. Karena keterkaitan itu maka, sumber ancaman dapat dibedakan menjadi ancaman militer, ancaman non-militer, maupun gabungan keduanya. Sehingga objek ancaman dapat terbagi 4 yakni: keamanan negara, keamanan intra

negara, dan keamanan manusia (*Paris et al.*, 2001).

Dalam studi keamanan manusia terdapat beberapa mazhab, seperti Barry Buzzan yang berasal dari *Copenhagen School*. Selain itu terdapat *Welsh School* yang sering dijadikan sebagai fokus dalam menjelaskan keamanan manusia. *Welsh School* dipelopori oleh Ken Booth, yang memiliki dua dasar pemikiran, yakni *radical interpretation* dan *critical theory* (Hidayat, 2017). Booth sangat menitikberatkan kepada pertanyaan ontologis dalam melihat keamanan tradisional yang sangat *state-centric*. Oleh karena itu, ia memberikan konsep yang disebut dengan konsep emansipasi. Konsep ini menjelaskan bagaimana keamanan merupakan bentuk pembebasan manusia dari *personal violence* yang nantinya juga mempengaruhi *structural violence* yang berwujud *freedom for want* dan *empowerment dignity* (Hidayat, 2017).

Adanya justifikasi terhadap keputusan yang diambil oleh aktor (negara) yang diambil melalui kebijakan perdana menteri. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa Rudd menjadikan pencari suaka sebagai

ancaman terhadap kedaulatan Australia. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Rudd yang kontroversial akibat mengeluarkan *PNG (Papua New Guinea) Solutions* dan menghentikan Solusi Pasifik yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya mengakibatkan munculnya kritikan dari internal maupun eksternal.

Secara internal kebijakan Rudd dikritik habis-habisan oleh ketua oposisinya yakni Tony Abbott selaku pemimpin Partai Liberal Australia yang mengedepankan HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana yang dijanjikan dalam konsep liberal, yakni adanya hak-hak untuk hidup yang lebih baik, serta muncul kritikan dari Partai Hijau yang menyatakan bahwa kebijakan Rudd sangat menjijikan (Merrel, 2020). Dari sektor eksternal, Rudd kembali mengalami kritikan dari *Amnesty International*, organisasi yang bergerak dalam kemanusiaan.

Dalam laporan Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan Australia, pencari suaka mengalami peningkatan pada 2010. Kemudian pada 2012 adanya peningkatan yang

cukup pesat. Para pencari suaka ini ditahan di Pulau Christmas di tahun 2013 dan yang diizinkan untuk menetap di Australia hanya sebanyak 2.771 orang. Justifikasi Rudd atas keluarnya *PNG Solution* adalah orang-orang yang mencari suaka kebanyakan adalah orang-orang yang berasal dari Afghanistan dan Srilanka, serta beberapa dari negara-negara di Pasifik. Rudd yang menyebut mereka dengan sebutan orang kapal telah menyewa penyelundup untuk bisa masuk ke Australia dengan identitas sebagai pengungsi. Australia menggelontorkan banyak dana dalam masalah pengungsi dan Rudd pikir dana tersebut bisa dialokasikan ke sektor yang lain seperti pembangunan maupun keamanan.

Apabila melihat sejarah Australia, penduduk yang sekarang adalah para orang perahu yang berasal dari daratan Eropa Timur maupun Eropa Barat pasca Perang Dunia. Karena penduduk asli Australia sendiri adalah suku aborigin dan warga negara Australia tahu bagaimana sejarah kedatangan mereka ke Pasifik. Melihat bahwa yang menjadi fokus adalah mengenai

keamanan, maka kita bisa melihat Konsep Sekuritisasi Barry Buzan dalam bukunya *Security: A New Framework for Analysis*. Dalam studi kawasan, Buzan memberikan perspektif bahwa sebuah fenomena sosial merupakan bagian dari keamanan yang kompleks. Sebagaimana yang dikatakan dalam bukunya: “*understand the national security of any given state without understanding the international pattern of security interdependence in which it is embedded*” (Stone, 2009). Oleh karena itu menjadi sangat kompleks dan memiliki keterkaitan dengan negara-negara di sekitarnya. Dalam bidang keamanan Australia yang tergabung dalam ANZUS (*Australia, New Zealand, United States Security Treaty*) dalam kerjasama keamanan. Selain dengan konsep *deterrence* hal ini juga bisa memperkuat stabilitas Australia sendiri, dengan label *high power country*.

Dalam menganalisis kebijakan Kevin Rudd mengenai para pencari suaka khususnya dalam kerjasama dengan Papua Nugini terkait *PNG (Papua New Guinea) Solution* akan dianalisis dengan Model Birokrasi

dalam menganalisis kebijakan luar negerinya. Di mana adanya SOP (standar operasional prosedur) dalam yang juga bagian dari politik. Hal ini terkait dengan adanya partai-partai politik yang tergabung dalam kabinet dan Australia memiliki sistem barat dalam kabinetnya sehingga ada pihak pemerintah dan oposisi. Hal ini bisa dikaitkan dengan latar belakang partai-partai politik dalam melihat kebijakan yang dikeluarkannya. Bagaimana Rudd sebagai mantan Ketua Partai Buruh. Namun yang kita bicarakan adalah bagaimana bagaimana pengaruh latar belakang tersebut dalam kebijakan Australia terhadap pencari suaka atau orang perahu.

Dalam menganalisis kebijakan menggunakan model birokratik terdapat asumsi dimana aktor yang mengambil kebijakan luar negeri ditentukan oleh politik domestik. Untuk memahami politik domestik ada yang disebut dengan tawar-menawar posisi pemain yang merupakan perwujudan dari hierarki politik dalam pemerintahan (Allison & Halperin, 2015). Sistem politik Australia adalah bipartisan, di mana

ada beberapa partai, dua yang terbesar adalah ALP (*Australia Labor Party*) dan Partai Liberal Australia. Selama pemerintahan Perdana Menteri Rudd maka, Partai Buruh adalah Partai Pemerintah. Sedangkan, Partai Liberal dan partai-partai kecil lainnya menjadi partai oposisi yang disebut sebagai Partai Koalisi.

Partai Buruh beraliran sosial demokratis. Sedangkan Partai liberal beraliran kanan. Kebijakan yang diambil oleh perdana menteri biasanya akan sesuai dengan ideologi yang dianut partai penyokongnya. Meskipun beraliran kiri, apabila dilihat dari sejarahnya Partai Buruh tidak pernah berhasil menasionalisasi perusahaan asing. Oleh karena itu, Partai Buruh kerap dilabeli beraliran kapitalisme. Dalam sejarahnya, Partai Buruh mendukung kebijakan *White Australia* pada abad ke-19 yang juga kerap diberlakukan oleh negara-negara eropa. Meskipun demikian, Partai Liberal juga ikut mendukung kebijakan *White Australia*, untuk menjaga homogenitas dan kerap mengeluarkan kebijakan yang mecegah upaya multikulturalisasi, khususnya dari Asia, terlebih pada

masa itu berasal dari Vietnam yang memiliki perbedaan ideologi dengan Australia.

PNG (Papua New Guinea) Solutions merupakan kebijakan yang dikeluarkan Rudd di periode kedua pemerintahannya di tahun 2013. Meskipun di pemerintahan pertamanya, ia telah menghapus kebijakan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Howard, namun Rudd sendiri juga mengalami perubahan arus dalam mengeluarkan kebijakan terkait pengungsi di Australia. Menurut Rudd, kebijakan yang dikeluarkan Howard merusak reputasi Australia dan menuunkam upaya untuk melakukan diplomasi regional. Oleh karena itu, Rudd menggagas program yang dianggap lebih humanis, adil, dan tetap menjaga keamanan (McKay et al., 2017). Namun, pada 2013 akibat masih adanya lonjakan pencari suaka, maka kebijakan *PNG (Papua New Guinea) Solutions* ini tidak bisa dilepaskan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Howard. Dalam melihat hal in, adanya perpindahan kekuasaan yang berturut-turut setelah Howard. Rudd, Gillard,

kemudian Rudd lagi maka kebijakan terkait akan tetap menunjukkan satu arah yang sama, meskipun tidak dapat menafikkan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa menahan jumlah pencari suaka yang datang. Kemudian, Abbott yang menggantikan Rudd kembali menggunakan *Pacific Solutions* seperti masa Howard.

Selain itu, keterkaitan antara kebijakan luar negeri Australia sangat dipengaruhi oleh partai politik yang berkuasa, meskipun untuk beberapa isu terdapat tekanan dari publik, isu ini biasanya meliputi permasalahan ekonomi. Pada 2016 dikeluarkan kebijakan *White Paper*, pendekatan Pemerintah terhadap kebijakan luar negeri dan perdagangan adalah pentingnya itu menempatkan hubungan bilateral sebagai sarana memajukan kepentingan Australia (Pijovic, 2016).

Salah satu idealisme yang dianut oleh Partai Buruh Australia adalah meyakini bahwa kebijakan luar negeri harus mengedapankan kepentingan Australia, namun juga harus tetap berbelaskasih terhadap warga negara internasional. Idealisme ini bisa dilihat dari upaya Rudd

untuk tetap mempertahankan nama baik Australia dalam kancah Internasional, namun ketika upaya yang telah dilakukannya tidak efektif, maka ini akan berbalik menyerang Australia, seperti kerjasama dalam PNG (*Papua New Guinea*) *Solutions*, yang justru memberikan umpan balik yang buruk bagi Australia dari organisasi kemanusiaan internasional.

PNG (*Papua New Guinea*) *Solutions* mendapat kecaman dari Partai Nasional Koalisi yang pada waktu itu dipimpin oleh Abbott, dengan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Rudd telah melukai perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Australia. Hal ini bertentangan dengan idealisme yang dianut oleh Partai Buruh, yakni mempertimbangkan rasa belas kasih terhadap warga negara lain. Secara kepentingan, Australia terlihat memiliki dedikasi dalam mengurangi jumlah pencari suaka. Namun, dalam sisi moralitas pelarangan untuk tinggal di daratan Australia dengan cara meletakkan para pencari suaka di Papua Nugini dengan latar negara masih terbawah justru terlihat bahwa Australia menggunakan kekuatannya

di kawasan secara maksimal. Ia tidak hanya mengendalikan jumlah pencari suaka tetapi juga tidak perlu repot dalam mengurus masalah pengungsi.

Kecaman ini juga menjadi masalah panjang karena pada praktiknya juga ditolak oleh warga negara Papua Nugini. Bantuan yang diberikan Australia terhadap Papua Nugini hanya hal kecil dibandingkan mengurus jumlah pengungsi yang berada di Papua Nugini, peningkatan kriminalitas, kekerasan yang dialami oleh pencari suaka, hingga ketidakjelasan status para pencari suaka. Para pencari suaka kemungkinan besar akan kembali ke negara asalnya sebagai opsi yang lebih aman dibandingkan harus tinggal di Papua Nugini yang juga sama sulitnya akibat hidup dalam keterbatasan dan ketidakpastian. Dunia internasional melihat bahwa Perdana Menteri Papua Nugini tidak terlalu paham apa yang ditandatanganinya terkait masalah pencari suaka di Australia. Elite politik Papua Nugini lebih banyak mengambil peran dalam keputusan untuk menjalin kerjasama dengan Australia, namun di satu sisi hal ini

dapat dilihat sebagai jeratan perangkap yang dilakukan oleh Australia atas Papua Nugini.

Kebijakan ini mungkin akan semakin menonjolkan sisi egois sebuah negara, meskipun konsep kepentingan nasional adalah hal yang menjelaskan tersebut. Hanya saja, citra Australia sebagai negara yang konstruktif yang dibangun oleh pemerintah sebelumnya akan hilang. Serta permasalahan inilah yang akan dijadikan bahan serangan oleh Partai Koalisi Nasional dalam proses pemilihan umum berikutnya. Permasalahan orang perahu dan penyulundupan manusia akan tetap menjadi tugas berkelanjutan yang dimiliki oleh Australia untuk keamanan negaranya maupun kawasan.

SIMPULAN

Apa yang dapat dilihat dari proses pengambilan kebijakan *Anti-Resettlement* yang dilakukan oleh Australia pada masa pemerintahan Rudd yang kedua yang menghasilkan kerjasama bilateral dengan Papua Nugini berupa *PNG (Papua New Guinea) Solutions* dalam perspektif

model birokratik politik adalah segala kebijakan merupakan hasil dari keputusan yang telah dikompromikan dengan partai politik yang sedang berkuasa menjadi pemerintah. Segala kebijakan yang diambil merupakan proses yang panjang dan dapat dilihat dengan ciri khas partai politik masing-masing. Namun, perlu diingat adalah tidak semua kebijakan yang diambil akan ditentang oleh pihak oposisi, terkadang sebuah kebijakan akan tetap didukung oleh partai oposisi apabila kebijakan tersebut mampu memaksimalkan kepentingan nasional Australia.

DAFTAR PUSTAKA

- Allison, G. T., & Halperin, M. H. (2015). Bureaucratic politics: A paradigm and some policy implications. *Theory and Policy in International Relations*, May, 40–79. <https://doi.org/10.2307/2010559>
- Hidayat, R. A. (2017). Keamanan manusia dalam perspektif studi keamanan kritis terkait perang intra-negara. *Intermestic of Internatiol Studies*, 1(2), 108–129. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.3>
- McKay, F. H., Hall, L., & Lippi, K. (2017). Compassionate Deterrence: A Howard Government Legacy. *Politics and*

- Policy*, 45(2), 169–193.
<https://doi.org/10.1111/polp.12198>
- Millbank, A. (2009). Kind or cruel? Labor's boat people policies. *People and Place*, 17(4), 8–17.
- Paris, R., Beer, F., Brooks, S., Chan, S., Ciof, C., Dueck, C., Goldring, N., Hurd, I., Jakobsen, P. V., & Leblang, D. (2001). *Human Security*. 26(2), 87–102.
- Pijovic, N. (2016). The Liberal National Coalition, Australian Labor Party and Africa: two decades of partisanship in Australia's foreign policy. *Australian Journal of International Affairs*, 70(5), 541–562.
<https://doi.org/10.1080/10357718.2016.1167835>
- Rizal, F. (2019). Kebijakan Unilateral Penanganan Imigran Ilegal Australia Pasca Pemilihan Umum Australia Tahun 2013. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 20(2), 137.
<https://doi.org/10.7454/global.v20i2.332>
- Stone, M. (2009). Security according to Buzan: A comprehensive security analysis. *Security Discussion Papers Series*, 3(1991), 432–433.
http://www.geest.msh-paris.fr/IMG/pdf/Security_for_Buzan.mp3.pdf
- Tamba, R. S. (2018). Kebijakan PNG Solutions dalam Menangani Pengungsi dan Pencari Suaka di Australia Periode Kevin Rudd. *Jurnal of International Relations*, 2-5.
- Walton, B. G. (2013). *seekers , negative nationalism and the PNG solution*.